

Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu di Pulau Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep

Ninis Trisyani

Abstrak: Pulau Poteran merupakan salah satu pulau yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sumenep. Dalam upaya pemerataan pembangunan, pengelolaan pulau-pulau kecil sudah saatnya mendapat perhatian pemerintah daerah setempat. Untuk mengoptimalkan upaya tersebut, dilakukan rencana pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, yang melibatkan beberapa *stake holder* yang terkait, untuk menemukan isu-isu utama di wilayah tersebut serta mencoba memecahkannya. Hasil pemikiran yang sudah dirancang, perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumenep sehingga permasalahan yang terdapat di lingkungan P.Poteran dapat segera diatasi.

Kata kunci: pengelolaan, pulau-pulau kecil, *stake holder*

Korespondensi: Jurusan Perikanan, Fakultas Teknologi Kelautan dan Perikanan, Universitas Hang Tuah Surabaya, Jl. Arief Rachman Hakim 150 Surabaya 60111.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan salah satu sub sistem dalam pembangunan Nasional, yang berarti bahwa pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sekaligus menyatu dengan pembangunan Nasional. Penyelenggaraan pembangunan daerah harus dari, oleh dan untuk masyarakat, yang dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat secara berencana, bertahap dan berkesinambungan, sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah.

Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selama ini sedikit sekali tersentuh, sehingga jauh tertinggal dari kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh daratan atau pulau-pulau besar. Kondisi ini mengakibatkan penduduk miskin kian meningkat, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, merosotnya kualitas lingkungan, menipisnya sumberdaya alam dan terancamnya kekayaan flora serta fauna terhadap kepunahan.

Pemberdayaan pulau-pulau kecil secara optimal dan lestari berdasarkan karakteristik dan potensi lokal, merupakan salah satu kebijakan Departemen Kelautan dan Perikanan. Kebijakan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa kepulauan Indonesia didominasi oleh pulau-pulau kecil yang secara ekonomis sangat potensial untuk dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pulau-pulau kecil juga dikaitkan bahwa pulau-pulau kecil memiliki nilai strategis sebagai sabuk ekonomi dan sabuk pengaman, sehingga pengelolaannya perlu diatur agar memperoleh manfaat yang berkelanjutan dengan memperhatikan keterkaitan ekosistem dalam suatu gugusan pulau (Anonymous, 2001).

Upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hendaknya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan beberapa *stake holder* yang terkait dengan rencana pengelolaan, dengan harapan rencana tersebut dapat didukung oleh semua instansi dan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan.

Kabupaten Sumenep sebagai daerah kepulauan memiliki 76 buah pulau (Anonymous, 2001), mempunyai potensi sumberdaya alam yang cukup potensial untuk dikelola bagi kemakmuran masyarakat pulau. Pulau Poteran merupakan salah satu pulau di gugusan pulau yang berada di Kabupaten Sumenep, yang letaknya berdekatan dengan daratan Kabupaten Sumenep. Pulau ini mempunyai keanekaragaman produksi yang cukup tinggi baik sektor perikanan, pertanian, perkebunan dan pariwisata. Potensi yang cukup besar yang dimiliki pulau kecil ini masih belum banyak dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan pada sumberdaya masih dilakukan secara sektoral. Oleh karenanya pulau Poteran sebagai pulau kecil perlu dikembangkan melalui Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu.

Tujuan dari survai ke Pulau Poteran ini adalah: (1) Mengidentifikasi potensi sumberdaya pesisir; (2) Mengidentifikasi isu-isu pengelolaan wilayah pesisir; (3) Menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode survai dengan cara observasi langsung di lapangan serta wawancara dengan pejabat (Stake holder) dan penduduk setempat. Data sekunder untuk menunjang informasi mengenai Pulau Talango, Kecamatan Poteran diperoleh dari kecamatan setempat dan BPPS Kabupaten Sumenep. Pelaksanaan survai dilakukan pada bulan September 2001, yang merupakan bagian dari kegiatan pelatihan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diselenggarakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Kabupaten Sumenep. Survai yang dilakukan melibatkan beberapa stakeholder Dinas-dinas di Kabupaten Sumenep, diantaranya Dinas Pertanian, Dinas Pertambangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, DPRD Sumenep, dan Perguruan Tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Wilayah dan Penduduk

Kecamatan Talango adalah wilayah kepulauan yang terletak di sebelah Timur Kabupaten Sumenep dengan jarak kurang lebih 12 km, dengan batasan wilayah sebelah Utara Selat Talango, sebelah Timur Selat Talango, sebelah Selatan Selat Madura dan sebelah Barat Selat Talango. Luas kecamatan 4.183 km² yang dibagi menjadi 8 desa. Keadaan wilayah berada pada ketinggian kurang dari 50 m dari permukaan air laut, topografi 75% datar dan 25% landai, jenis tanah latosol dan mediteran merah kuning.

Penduduk pada tahun 2000 sejumlah 37.486 orang atau 370 jiwa per km². Mata pencaharian utama adalah pertanian (80%), perikanan (8%), selebihnya adalah PNS dan pedagang. Tingkat pendidikan sangat tertinggal karena hanya 29 % saja yang bisa menikmati pendidikan. Fasilitas pendidikan yang dimiliki hanya setingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, masyarakat harus keluar pulau. Terdapat 1 puskesmas induk dan 2 puskesmas pembantu. Industri rumah tangga banyak berkembang, yang umumnya mengolah bahan baku yang didapatkan dari pulaunya yaitu pembuatan krupuk ikan, kripik sukun, gula siwalan, pengolahan dan pengeringan ikan teri, dan pengeringan rumput laut *euchema cottoni*.

Sarana transportasi dari Pelabuhan Kalianget - Talango dapat ditempuh dengan menggunakan perahu tongkang, dan jalan protokol yang melewati semua desa telah diaspal sepanjang 42 km.

Sumberdaya Alam

Sumberdaya yang terdapat di Kecamatan Talango dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sumberdaya yang terdapat di Kecamatan Talango

| Sumberdaya | Jenis komoditi |
|----------------|---|
| Tanaman Pangan | Jagung, ketela pohon, kacang-kacangan, lombok, mangga, nangka, semangka |
| Perkebunan | Kelapa, tembakau, cabe jamu, kapuk randu |
| Peternakan | Kambing, Sapi |
| Kehutanan | Jati, akasia, mangrove |
| Perikanan | Teri putih, Kerapu lumpur, rajungan, rumput laut (<i>euchema cottoni</i>) |
| Pertambangan | Batu karang, pasir laut |
| Pariwisata | Pesarean Asta Sayid Yusuf, Pantai Ponjuk |

Kondisi Lingkungan

Pesisir Pulau Poteran sebagian besar pantainya berbatu dan sebagian lagi berpasir. Dibeberapa tempat terlihat adanya gejala abrasi (pengikisan garis pantai) akibat pengambilan batu karang oleh penduduk untuk dijadikan bahan bangunan dan bahan jalan. Berdasarkan pengamatan vegetasi tanaman pangan dan perkebunan, bagian utara lebih subur dibandingkan bagian selatan. Ekosistem perairan yang didapatkan adalah ekosistem mangrove di desa Essang, dan terumbu karang di Desa Padike. Perairan Talango banyak menghasilkan ikan teri nasi, yang nantinya diolah oleh perusahaan pengolahan berskala nasional. Budidaya rumput laut spesies *euchema cottoni* banyak didapatkan di perairan yang relatif tenang.

Isu-isu Utama

Berdasarkan data yang terkumpul serta pengamatan kondisi lingkungan di lapangan serta aspirasi yang disampaikan masyarakat setempat, maka isu-isu utama yang ditemukan adalah: (1) Di beberapa wilayah terjadi erosi, terutama tanah pada daerah lereng perbukitan yang kritis, karena banyak penebangan tanaman tanpa diimbangi dengan perejaman tanaman; (2) Adanya abrasi pantai terutama di daerah pesisir pantai utara, selatan dan timur, karena tidak adanya penahan/penangkis ombak dan banyaknya penebangan tanaman mangrove untuk pengembangan area budidaya rumput laut dan juga tempat berlabuh perahu nelayan; (3) Pada saat musim panen raya ikan teri, mengalami kesulitan pemasaran karena adanya persaingan yang tidak sehat antara pedagang pengepul dengan pihak perusahaan pengolahan ikan teri, sehingga banyak teri yang dijual dibawah harga standar; (4) Pemasaran rumput laut masih didominasi oleh para tengkulak, belum ada koperasi yang menangani hasil rumput laut ini. Mutu panen juga tidak seragam sehingga harga jual sangat berfluktuatif; (5) Banyak dilakukan pengambilan/ penambangan batu karang dan pasir laut oleh masyarakat setempat untuk digunakan sebagai bahan bangunan, sehingga merusak lingkungan perairan; (6) Lemahnya atau kurang berfungsinya kelembagaan ekonomi (koperasi) pada kelompok tani/nelayan, sehingga ada kecenderungan masyarakat meminjam modal kepada para pengijon; (7) Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan masih kurang, terlihat belum dilengkapinya rumah-rumah dengan fasilitas tempat pembuangan (WC); (8) Kurang tersedianya fasilitas pendidikan tingkat lanjutan (SLTP atau SLTA), sehingga banyak anak didik yang melanjutkan sekolah keluar pulau, bahkan ada yang terpaksa tidak melanjutkan sekolah; (9) Potensi pariwisata belum banyak dikenal, antara lain pesarean Asta Yusuf, Pantai Ponjuk dan panorama laut di P. Gili Labak.

Rencana Pengelolaan

Dari beberapa isu yang ditemukan di Pulau Poteran, dipilih dua isu yang dianggap penting untuk ditindaklanjuti dalam bentuk perencanaan pengelolaan. Rencana pengelolaan dilakukan secara terpadu dan melibatkan beberapa dinas yang terkait, agar rencana ini mencapai hasil maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Rencana pengelolaan pada isu abrasi dan koperasi nelayan tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Pengelolaan pada Isu Abrasi dan Koperasi Nelayan

| Isu pilihan | Stakeholder yang terlibat | Tugas/kewenangan/fungsi |
|---------------------------------|---------------------------|---|
| Abrasi | Bapedalda | Mensosialisasikan pentingnya pengelolaan lingkungan khususnya penanganan abrasi |
| | P.U | Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan penahan ombak secara teknis |
| | Bappeda | Perencanaan dan pengalokasian dana untuk dinas serta pengkoordinasian pelaksanaan program |
| | Hutbun | Pengadaan bibit untuk kegiatan penghijauan hutan mangrove |
| | DKP | Memberikan pembinaan pentingnya hutan mangrove |
| | Kelompok sosial keagamaan | Wahana sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam penanganan abrasi |
| | Masyarakat setempat | Ikut berpartisipasi dalam penanganan abrasi |
| Pemberdayaan masyarakat nelayan | DKP | Melakukan sosialisasi tentang penanganan pasca panen rumput laut <i>euchema cottoni</i> atau cara penangkapan ikan yang benar |
| | Dinas Koperasi | Memfungsikan dan memberdayakan koperasi yang sudah ada |
| | Disperindag | Pengenalan teknologi tepat guna tentang pengelolaan pasca panen dan menyediakan informasi pasar |
| | Perbankan | Pemberian dana lunak |
| | Pengusaha | Menjalin kemitraan yang menguntungkan semua pihak |

Rencana pengelolaan ini masih bersifat usulan, keputusan pelaksanaan tergantung pada disetujui atau tidaknya rencana tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, sesuai dengan mekanisme pengelolaan pulau-pulau kecil dalam pedoman umum pengelolaan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat yang menyebutkan bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bekerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rencana pengelolaan ini diharapkan bisa dilakukan secara terpadu oleh semua stake holder yang terlibat didalamnya serta tugas dan wewenang yang jelas yang harus dilakukan oleh masing-masing stake holder. Tugas dan wewenang terkait juga dengan pendanaan yang bisa diberikan oleh masing-masing sektor. Dengan demikian rencana yang sudah disusun ini harus didukung oleh dinas serta pendanaan yang jelas, sehingga masyarakat bisa segera menikmati pembangunan di pulaunya

KESIMPULAN

Pengelolaan Pulau-pulau kecil secara terpadu hendaknya dilakukan oleh Kabupaten/kota yang memiliki pulau-pulau kecil, agar pembangunan nasional dapat merata dan dirasakan oleh masyarakat pulau.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahuri, R. 2000. *Pengembangan dan Pembinaan Masyarakat Pesisir*. Seminar Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Untuk Memanfaatkan Sumberdaya Perairan. Tantangan dan Peluang. The Habibie Center, Jakarta, 20 Juni.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2001. *Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Pemerintah Kabupaten Sumenep. 2001. *Statistik Kabupaten Sumenep*. Sumenep: Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- Pemerintah Kabupaten Sumenep. 2001. *Statistik Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep*. Sumenep: Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- Retraubun, A. 2002. *Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil*. Seminar Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu. Universitas Diponegoro. Semarang, 4-8 Maret.